

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA SAING RAMBI KECAMATAN
SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:

LEDO INDO^{1*}

NIM. E1031141039

Dr. Yulius Yohanes, M. Si². Bima sujendra, S.IP, M.Si²

*E-mail: ledoindo97@gmail.com

1. Students of Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.
2. Lecturer in Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRAK

The writing of this thesis was based on the identification of a phenomenon that occurs related to the Performance of the Village Consultative Body in the administration of the Village Government in Saing Rambli Village Sambas Subdistrict Sambas Regency. This research is intended to describe and study and analyze the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its duties and functions in channeling the aspirations of the community, namely in making and drafting Village Regulations. This title of this thesis was appointed based on problems regarding the performance of the BPD which were considered less than optimal in channeling the aspirations of the community in making Village Regulations, because there were no Village Regulations made by the BPD other than the Code of Conduct for the BPD Itself. As well as the aspirations of rural communities that were not followed up by the BPD. This research used descriptive research with qualitative research methods. Data were collected using observation, interview and documentation techniques. The research was carried out at Saing Rambli Village Sambas Subdistrict, Sambas Regency. The indicators used to measure the performance of the BPD are Responsiveness, Responsibility and Accountability according to Moehariono. The conclusion in this study is that the Village Consultative Body (BPD) has not been maximized in carrying out its duties and functions due to a lack of understanding of its tasks and functions as well as a lack of understanding in the mechanism of Village Regulation Formulation so that the BPD has not been maximized in channeling community aspirations in the form of Village Regulations.

Keywords : BPD Performance, Village Regulations, Community Aspirations.

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA SAING RAMBI KECAMATAN
SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

Oleh:

LEDO INDO^{1*}

NIM. E1031141039

Dr. Yulius Yohanes, M. Si². Bima sujendra, S.IP, M.Si²

*Email: ledoindo97@gmail.com

3. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi akan adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu dalam membuat dan menyusun Peraturan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai kinerja BPD yang dinilai kurang maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat Peraturan Desa, dikarenakan belum adanya Peraturan Desa yang dibuat BPD itu sendiri selain dari Peraturan Tata Tertib BPD. Serta aspirasi masyarakat desa yang kurang ditindak lanjuti oleh BPD. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja BPD tersebut adalah Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas menurut Moehariono. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya serta juga kurangnya pemahaman dalam mekanisme Penyusunan Peraturan Desa sehingga BPD belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa.

Kata Kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan juga diterapkan dalam pemerintahan desa. Adapun salah satu wewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa adalah membuat Peraturan Desa yang dalam perumusannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan desa dibuat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan roda pemerintahan di desa. Sehingga dengan adanya peraturan desa, masyarakat desa menjadi lebih tertib dikarenakan adanya peraturan tertulis yang mengaturnya serta juga untuk meningkatkan pembangunan desa.

Kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh mitra desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan desa yang diangkat dari tokoh masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 55 dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja desa.

Berdasarkan Pra penelitian (*Pre survey*) yang dilakukan beberapa

waktu yang lalu di masa – masa senggang waktu kuliah, tepatnya di Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Penulis menemukan fenomena mengenai BPD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jika dilihat dari tugas dan fungsi BPD, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Saing Rambli belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peraturan yang ada selama priode masa kerja 2018-2024 hanya ada (satu) peraturan saja yaitu tata tertib BPD. Peraturan mengenai tata tertib BPD tersebut merupakan peraturan wajib yang dibuat sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, BPD juga masih belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi, dikarenakan kurang aktifnya BPD melakukan pertemuan atau rapat yang melibatkan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun Desa. Rapat sangat jarang diadakan dikarenakan dari anggota BPD terkadang tidak mempunyai waktu karena kesibukannya masing-masing. Kadang rapat diadakan dirumah ketua BPD dan terkadang rapat juga diadakan bergantian di rumah ketua dan anggota BPD itu sendiri. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD melibatkan masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasinya dalam rapat-rapat

tertentu yang sifatnya menyangkut kepentingan desa, sehingga aspirasi masyarakat bukan hanya sekedar ditampung tetapi juga dapat direalisasikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1 Kinerja

Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performances* yang sering diartikan hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Kinerja juga dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Amstrong dan Baron, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibowo. (2013, 2) bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Kinerja yang optimal dapat diwujudkan apabila kinerja yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang didapatnya. Kinerja yang berhubungan langsung dengan kualitas layanan kepada konsumen. Kemampuan organisasi memahami konsumen. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

B.2 Indikator Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi

Kinerja Organisasi yang baik merupakan harapan bagi setiap organisasi. Sehingga untuk mengetahui baik atau tidaknya organisasi tersebut, maka diperlukannya indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja

organisasi. Menurut Hersey, sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2013, 106). Kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia. Menurut Wibowo (2007, 105). Kinerja organisasi adalah bagaimana suatu organisasi mencapai sukses untuk sebagian besar ditentukan oleh manajer. Apabila seorang manajer melakukan suatu pekerjaan dengan baik dapat dipastikan organisasinya dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Sebaliknya, apabila seorang manajer tidak mampu melakukan pekerjaan yang menjadi wewenangnya, maka organisasi yang dipimpinnya akan gagal dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.

Indikator ini dipersempit dan

diperjelas lagi oleh Moetherino (2012, 162) yaitu, ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

1. **Responsivitas (*Responsiveness*)**

Responsivitas merupakan daya tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan responsivitas dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Menurut Agus Dwiyanto, dkk (2006, 62). Responsivitas adalah kemampuan Birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan,

keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

Pengukuran responsivitas memerlukan dimensi dimensi operasional. Agus Dwiyanto, (2006, 3) mengemukakan bahwa indikator dari responsivitas adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir;
- b. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa;
- c. Pengguna keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa mendatang;
- d. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; serta
- e. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam system pelayanan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Responsivitas menjadi salah satu dari indikator suatu kinerja, dikarenakan responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan dari organisasi publik dalam menjalankan tujuan dan misinya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

2. **Responsibilitas (*Responsibility*)**

Responsibilitas mempunyai arti sebagai tanggapan. Makna responsibilitas dilihat secara umum bermakna tanggung jawab. Korelasi antara responsibilitas dan organisasi mengacu kepada tanggung jawab anggota kepengurusan dalam aspek kinerja berorganisasi.

Pengertian dari responsibilitas menurut Agus Dwiyanto (2006, 50), bahwa apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Pertanggungjawaban responsibilitas ini bersifat informal. Maksudnya tanggung jawab terhadap hati nurani, nilai yang kita anut dan yakini. Sehingga di dalam prakteknya responsibilitas ini digunakan untuk melengkapi kekurangan dari akuntabilitas. Responsibilitas mempunyai sejumlah konotasi yang di dalamnya termasuk kebebasan untuk bertindak. Dengan responsibilitas, akan diminta pertanggung jawaban hak dan kewajibannya, tindakan-tindakannya, keahlian dan waktu yang digunakan dihadapan politik.

Pada hakikatnya responsibilitas merupakan standart professional yang dicapai atau dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Sehingga dengan responsibilitas ini bisa dijadikan atau dipergunakan sebagai alat maupun sarana untuk menilai kualitas kerja, sehingga dapat mengetahui serta mengukur kelebihan dan kekurangannya.

Sehingga responsibilitas disini dijelaskan apakah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijaksanaan organisasi yang baik.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat apakah lembaga telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sesungguhnya. Menurut Ellwood, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, (2006, 14), terdapat empat dimensi akuntabilitas yang

harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana politik.
- b. Akuntabilitas Proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses yang dilakukan.
- c. Akuntabilitas Program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas Kebijakan

terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dalam masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai suatusasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas ini dapatmenjadi pendorong dalam menciptakan atau mewujudkan suatu kinerja yang baik

seperti yang diharapkan.

Pelaksanaannya akuntabilitas mempunyai prinsip, yaitu mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidang tugasnya.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002, 08). Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi

pada masa yang akan datang.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

B.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson. Sebagaimana dikemukakan oleh Umam (2009, 189). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu kerja yaitu :

- a. Kemampuan
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
- e. Hubungan mereka dengan Organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja

(*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi Khaerul Umam (2009, 190), ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu:

- a. *Faktor individu* : Kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga pengalaman kerja, tingkat social dan demografi seseorang.
- b. *Faktor psikologi* : Persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja
- c. *Faktor Organisasi* : Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem penghargaan (*reward system*).

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas mengenai indikator kinerja organisasi, peneliti memilih indikator kinerja organisasi menurut Moehariono yang terdiri dari Responsivitas. Responsivitas dan Akuntabilitas. Peneliti memilih ketiga indikator tersebut, dikarenakan sangat berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat petunjuk atau pedoman yang merupakan strategi untuk menjawab strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah, karena pada tahap ini akan mengkaji bagaimana masalah penelitian yang ada dipecahkan atau ditemukan jawabannya. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009, 01) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang

dikumpulkan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian dengan metode kualitatif, peneliti yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya. Yaitu mengungkapkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dengan terjun langsung kelapangan untuk meneliti dan tidak menggunakan hipotesis seperti penelitian kuantitatif (Moloeng, 2004, 11). Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan social yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

C.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini

adalah situasi sosial, Informan sebagai narasumber dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganggap narasumber menjadi subjek utama dari penelitian ini. Peneliti dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Sugiyono (2011, 300) mengemukakan bahwa “*purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Subjek-subjek yang dipilih merupakan orang-orang yang mengetahui informasi mengenai Kinerja BPD dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Berikut Subjek utama dalam penelitian ini :

1. Kepala Desa Saing Rambi
2. Seketaris Desa Saing Rambi

3. Ketua BPD / Anggota Desa Saing Rambi mengadakan perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan teknik triangulasi, diskusi dengan pembimbing dari pihak terkait akan data dan mengadakan *member check*.
4. Tokoh masyarakat Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan data (Sugiyono, 2011, 365). Trigulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagi waktu. Triangulasi terdiri dari :

C.2 Objek Penelitian

Menurut Tohardi (2011, 34). Objek penelitian adalah apa yang diteliti dan terkandung dalam judul penelitian atau rumusan permasalahan penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dalam perumusan peraturan desa.

C.3 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh data itu pantas untuk digunakan dalam penelitian. Maka dari itu hal terpenting dari uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang kemudian dianalisis dan selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan dari sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan 2 (dua) model triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dilihat dari Responsivitas yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam

menjalankan misi dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kinerja BPD sebagai lembaga legislati dalam membuat Peraturan Desa belum berjalan dengan baik dan optimal.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat yang informan rasakan, permasalahan-permasalahan tersebut tidak terlepas dari kurangnya masih pengetahuan dan minimnya pengalaman dari BPD sendiri dikarenakan masih baru dan masih dalam tahap belajar serta juga belum adanya pelatihan dalam merancang perdes yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dan juga masalah tumpang tindihnya dengan peraturan yang akan di buat di desa dengan perda yang mengaturnya, dan sampai saat ini BPD belum dapat membuat satu produk hukum pun selain Peraturan Desa yang dibuat

oleh BPD yang lama yaitu Tata Tertib BPD. Jadi BPD belum bisa membuat Peraturan Desa yang mana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislasi di desa dalam membuat peraturan desa.

D.2 Responsibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dilihat dari Responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit dan ekspilisit. Terkait dengan kinerja BPD dalam membuat Peraturan Desa belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat dari informan yang mengetahui langsung Permasalahan-

permasalahan tersebut menunjukkan bahwa BPD sebagai lembaga legislasi dalam membuat Peraturan Desa masih belum ada satupun peraturan selain Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD yang lama, Peraturan Desa yang dibuat masih dalam tahap perencanaan dan belum terealisasikan. Dilihat dari sikap dan perilaku serta kedisiplinan dari anggota BPD sendiri bahwa BPD masing-masing mempunyai sikap dan perilaku yang baik namun dari segi kedisiplinan BPD masih kurang itu dilihat dari masih seringnya anggota BPD yang tidak hadir ke kantornya sendiri. Juga dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam bekerja dimana pihak desa sudah menyiapkan namun memang ada beberapa fasilitas yang rusak, akan tetapi sudah diatasi pihak desa

dengan mengganti sementara dari fasilitas tersebut. Jadi responsibilitas BPD yang menjelaskan bahwa apakah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi publik, dalam hal ini BPD masih belum optimal dengan terdapat beberapa kekurangan BPD dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi publik.

D.3 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD dilihat dari Akuntabilitas yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan masyarakat. Terkait dengan belum adanya

peraturan desa yang dibahas dan ditetapkan BPD bersama Kepala Desa, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat dari informan yang mengetahui langsung permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa BPD belum bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat dalam merumuskan dan membuat suatu peraturan desa. Dilihat dari target dan sasaran yang ingin dicapai dalam merumuskan peraturan desa, BPD belum bisa mencapai target dan sasaran yang dicapai dalam merumuskan peraturan desa karena memang belum ada peraturan yang dibuat BPD selain peraturan tata tertib BPD yang lama.

E. PENUTUP

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kemudian dihubungkan

dengan teori konsep Kinerja oleh Moetherino (2012:162) yang meliputi konsep responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat peneliti tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja BPD di Desa Saing

Rambi dikaji dari Responsivitas.

BPD Desa Saing Rambi belum baik dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari organisasi, dengan kaitannya dalam membuat peraturan desa.

Hal ini dikarenakan BPD juga kurang aktif dan tanggap dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sehingga yang terjadi pada masyarakat yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BPD.

2. Kinerja BPD di Desa Saing

Rambi dikaji dari Responsibilitas

Bahwa responsibilitas BPD masih

rendah dalam melaksanakan

kegiatan suatu organisasi sesuai

dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar. Hal ini

dikarenakan masih kurang

disiplinnya anggota BPD dan juga

pemahaman BPD tentang

mekanisme penyusunan dan

penetapan Peraturan Desa dan

belum adanya sosialisasi maupun

pelatihan yang berkaitan dengan

mekanisme penyusunan Peraturan

Desa yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah, sehingga

BPD saat ini belum dapat

menyusun Peraturan Desa.

Akibatnya sampai saat ini BPD

Desa Saing rambi masih belum

memiliki Peraturan Desa selain

Peraturan tata tertib yang dibuat

oleh BPD yang lama.

3. Kinerja BPD di Desa Saing Rambi dikaji dari Akuntabilitas

bahwa pertanggungjawaban BPD atas tugas dan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk peraturan desa belum optimal. Hal ini dilihat dari target dan sasaran yang ingin dicapai dalam merumuskan suatu peraturan desa, BPD belum bisa mencapai target dan sasaran yang dicapai dalam merumuskan peraturan desa karena memang belum ada peraturan yang dibuat oleh BPD sampai saat ini selain dari peraturan tata tertib yang dibuat BPD yang lama.

E.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada BPD Desa Saing rambi serta Pemerintah Desa Saing Rambi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai suatu tujuan dari BPD itu sendiri dalam berkerja sesuai tugas dan fungsinya dalam membuat dan merumuskan suatu peraturan desa, BPD harus lebih aktif dan tanggap dalam pendekatan dengan masyarakat dimana BPD harus lebih sering mengadakan rapat-rapat rutin bersama masyarakat minimal sebulan sekali sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Perlunya untuk meningkatkan kedisiplinan dari anggota BPD yaitu dengan cara dibuatkannya peraturan yang mengatur tentang

kedisiplinan BPD itu sendiri, dan perlu adanya pelatihan untuk BPD oleh pemerintah daerah yang terkait dalam

mekanisme penyusunan Peraturan desa, agar BPD dapat memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi dalam membuat dan merumuskan peraturan desa.

3. Untuk memudahkan BPD dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD, sebaliknya dilakukan inovasi dalam penyampaian aspirasi ataupun kritikan dari masyarakat, yaitu dengan membuat Kotak dan Kritik dan Saran yang diletakan di kantor desa maupun pada setiap pos kamling sehingga semua masyarakat dapat menyampaikan kritik dan sarannya.

E.3 Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan dilingkungan pemerintah desa, maka kesimpulan yang ditarik akan mempunyai implikasi dalam pemerintahan desa terutama mengenai BPD dan juga dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Defenisi dari implikasi tersebut merupakan prediksi (harapan) manfaat dari hasil penelitian untuk masa sekarang maupun masa akan datang, berkaitan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jadi implikasi teoritisnya adalah sebagai media sarana informasi dan pengembangan pengetahuan mengenai pemerintah desa khususnya mengenai kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini juga

berimplikasi untuk penelitian- penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan koreksi, saran serta masukan bagi BPD Desa Saing Rambli dalam meningkatkan kinerja kedepannya. Sehingga dapat lebih baik dari sebelumnya.

E.4 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Peneliti berharap dengan keterbatasan penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti yang lain. Adapun beberapa keterbatasan penelitian yang peneliti alami adalah

sebagai berikut :

1. Dari dokumen dan buku. Sulitnya mendapatkan dokumen seperti profil desa yang masih belum lengkap serta masih berbentuk angka dan table Sehingga menyulitkan peneliti dalam membuat diskripsi wilayah.
2. Wawancara dan mengolah data. Sulitnya peneliti untuk bertemu dengan Anggota BPD dikarenakan mempunyai kesibukan masing-masing dan memiliki pekerjaan utama selain ,menjadi anggota BPD. kemudian peneliti masih belum mampu mengembangkan isi dari wawancara dengan baik dikarenakan peneliti yang merupakan pemula sehingga

sedikit menyulitkan peneliti dalam melakukan wawancara.

3. Sebagian dari Informan ada yang susah untuk diwawancarai serta ada beberapa informan yang kurang terbuka ketika diwawancarai sehingga membuat peneliti harus lebih giat lagi dalam melakukan wawancara dan menggali informasi.

F. Daftar Pustaka

F.1 Buku:

- Dwiyanto, Aus dkk. 2006. *Mewujudkan Good Governance Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2.
- Moleong, Lexy. 2011. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pemasar
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudsyhuri, Zainuddin. 2008. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi Keenam: Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPEE
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif)*. Bandung : Fokusmedia.
- Siagian, Sodang. 2008. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Terry, George. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.
- Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Progam Studi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Bandar Maju. Nuzulita, Suci.2015. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas*. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas tanjungpura
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*. Bandung Alfabeta.

F.2 Undang - undang

- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

F.3 Peraturan Pemerintah

- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

F.4 Skripsi

- Hadiansyah, Nurul.2012. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas*. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi